

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

PENGADILAN NEGERI
LEMBATA KELAS II



Jl. Trans Atadei,
Lewoleba,
Kab. Lembata - NTT



(0383) 2343010



pn_lbt@yahoo.co.id



pn-lembata.go.id

PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami telah menyusun dan menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

Sesuai surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2876/SEK/OT.01.1/12/2022 tertanggal 14 Desember 2022 dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *accountability* maka diminta kepada satuan kerja untuk membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2022. Laporan ini merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan dan kinerja jajaran Pengadilan Negeri Lembata Kelas II dalam pelaksanaan tugas administrasi peradilan dan administrasi umum selama tahun 2022. Dengan segala keterbatasan sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang ada, kami tetap bertekad untuk menjalankan amanah negara yang dipercayakan kepada kami, dengan terus berupaya menjaga kemandirian, kredibilitas dan transparansi peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi membantu terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di negara tercinta ini.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan untuk peningkatan kinerja aparat Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

Lewoleba, 17 Januari 2023
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA

PERELA DE ESPERANZA, S.H.
NIP. 198011302003121001

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I. PENDAHULUAN	4
BAB II. A. KEADAAN PERKARA	6
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	6
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	8
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	9
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	10
B. PENYELESAIAN PERKARA	11
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	11
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	11
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ..	11
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi....	11
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi.....	11
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)	11
1. Posbakum	11
2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	12
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	12
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	13
Kondisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan/ Pendidikan	
1. Mutasi	15
2. Promosi	16
3. Pensiun	18
4. Diklat	18

BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	21
	A. Pengelolaan Keuangan	21
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	26
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi	30
	-Implementasi <i>e-court</i>	32
	-Implementasi SIPP	33
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	34
	1. Akreditasi Penjaminan Mutu	34
	2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	34
	3. Inovasi Pelayanan Publik	35
BAB VI	PENGAWASAN	37
	A. Internal	37
	B. Evaluasi	38
BAB VII	PENUTUP	39
	A. Kesimpulan	39
	B. Saran.....	39

BAB I PENDAHULUAN

KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan Kehakiman ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selain itu Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini merupakan syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang menunjukkan kemandirian lembaga dalam menyelenggarakan peradilan yaitu **Kemandirian Badan Peradilan Sebagai Sebuah Lembaga (Kemandirian Institusional) Serta Kemandirian Hakim Dalam Menjalankan Fungsinya Sesuai Undang-Undang** (kemandirian individual/fungsional), menjadi kata kunci dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut sesuai dengan undang-undang, Badan Peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial sebagai konsekuensi dari penyatuan satu atap, maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi dan finansial harus dijalankan secara baik agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya, dan harus didukung dengan aplikasi pengelolaan anggaran secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional/berimbang dalam APBN.

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di daerah dan merupakan ujung tombak Mahkamah Agung, telah menjalankan

dengan penuh rasa tanggung jawab dalam penyelesaian perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II agar tercapai proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan/murah, sebagai bentuk pelayanan kepada pencari keadilan dalam setiap proses peradilan yang dihadapinya, demi menumbuhkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Lembata Kelas II. Hal ini telah tertuang dalam Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari 3 (tiga) Program Utama yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung yaitu meningkatnya efektivitas koordinasi perencanaan program dan kegiatan, sumber daya serta pengelolaan administrasi teknis dan non teknis;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yaitu terlaksananya pembangunan, pengadaan, dan peningkatan sarana dan prasarana;
- c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umumnya itu penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Dimana pencapaian dari ketiga program tersebut dalam Tahun Anggaran 2022 telah memberikan hasil yang memuaskan dan merupakan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi pada Tahun Anggaran 2022.

BAB II

A. KEADAAN PERKARA

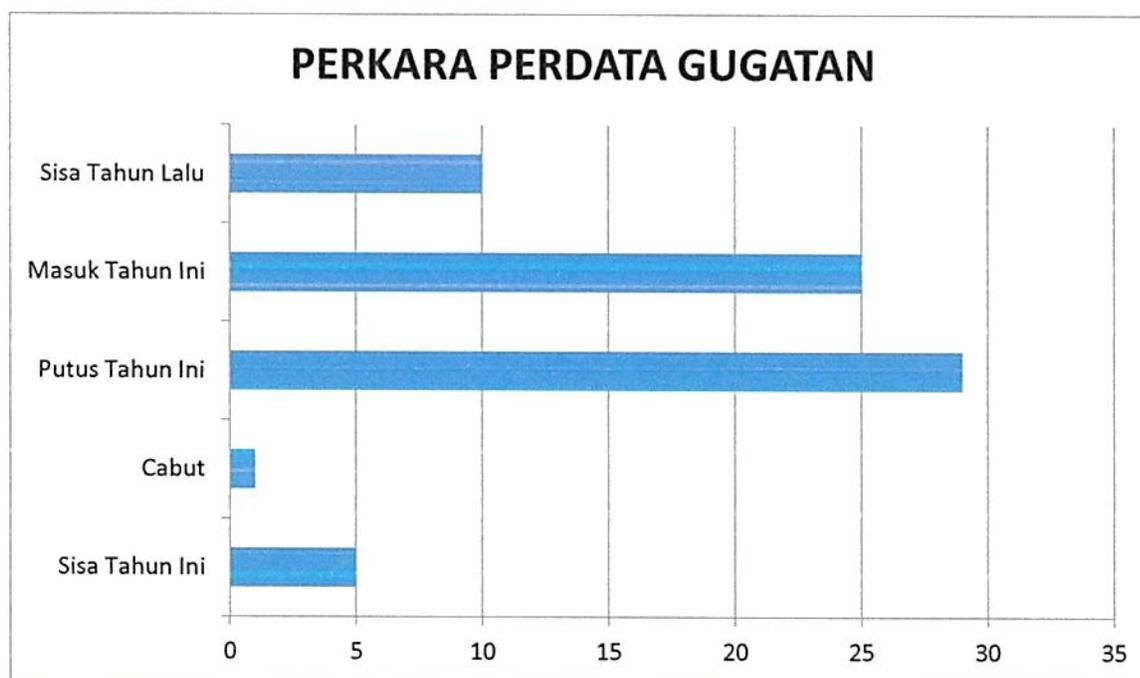
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Grafik Keadaan Perkara Tahun 2022



Ket. :

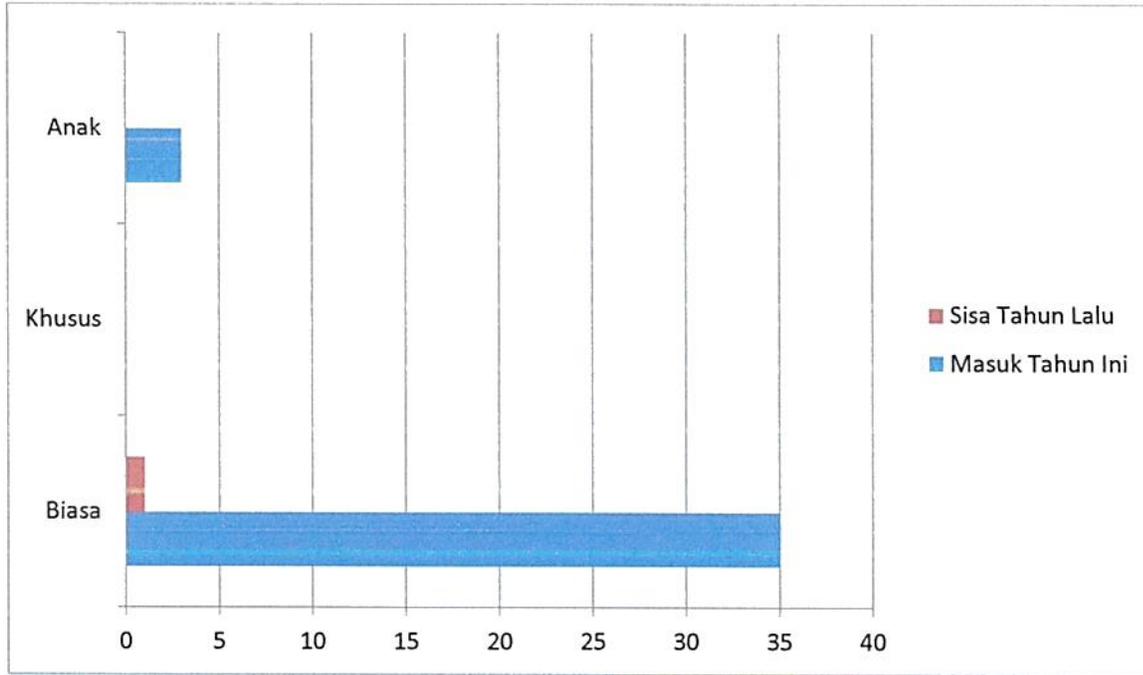
Sisa Tahun 2021 : 0 Perkara
Masuk Tahun 2022 : 6 Perkara
Putus Tahun 2022 : 6 Perkara
Cabut : 0 Perkara
Sisa Tahun 2022 : 0 Perkara



Ket. :

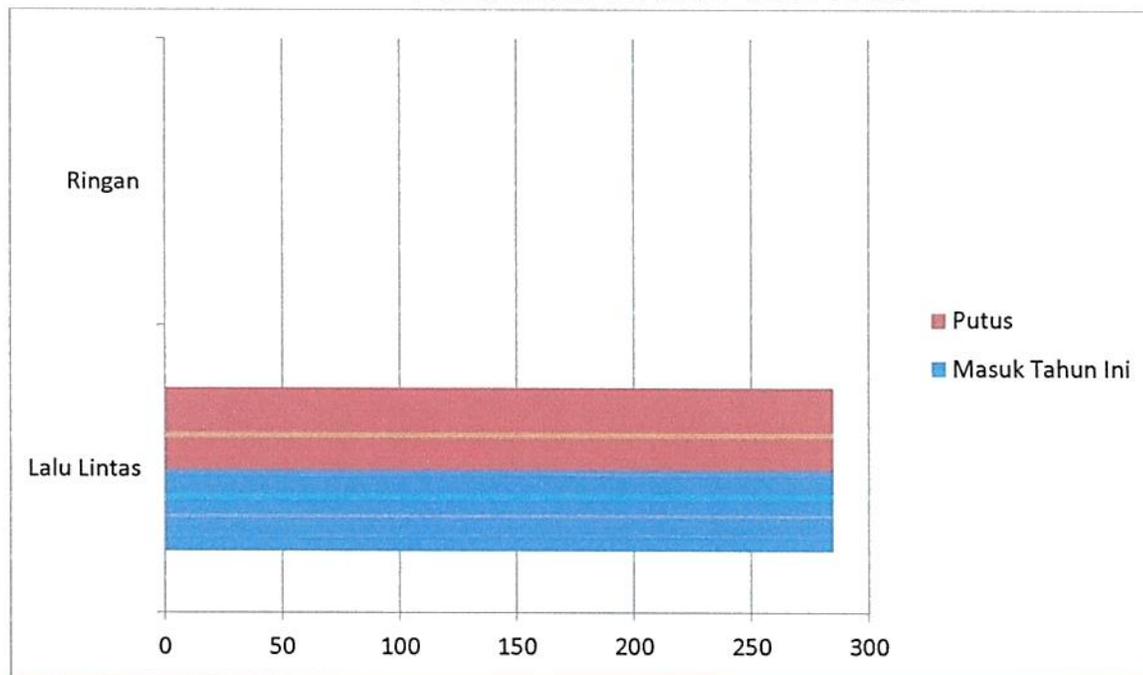
Sisa Tahun 2021 : 10 Perkara
Masuk Tahun 2022 : 25 Perkara
Putus Tahun 2022 : 29 Perkara
Cabut : 1 Perkara
Sisa Tahun 2022 : 5 Perkara

PERKARA PIDANA



Ket. :
 Sisa Tahun 2021 : 1 Perkara
 Masuk Tahun 2022 : 38 Perkara (Pidana Anak : 3 Perkara, Pidana Khusus : 0 Perkara)
 Putus Tahun 2022 : 34 Perkara
 Cabut : 0 Perkara
 Sisa Tahun 2022 : 2 Perkara

PIDANA LALU LINTAS



Ket. :
 Sisa Tahun 2021 : 0 Perkara
 Masuk Tahun 2022 : 285 Perkara
 Putus Tahun 2022 : 285 Perkara
 Cabut : 0 Perkara
 Sisa Tahun 2022 : 0 Perkara

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding



Ket. :
Sisa Tahun 2021 : 3 Perkara
Masuk Tahun 2022 : 0 Perkara
Putus Tahun 2022 : 3 Perkara
Cabut : 0 Perkara
Sisa Tahun 2022 : 1 Perkara



Ket. :
Sisa Tahun 2021 : 3 Perkara
Masuk Tahun 2022 : 0 Perkara
Putus Tahun 2022 : 3 Perkara
Cabut : 0 Perkara
Sisa Tahun 2022 : 0 Perkara

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

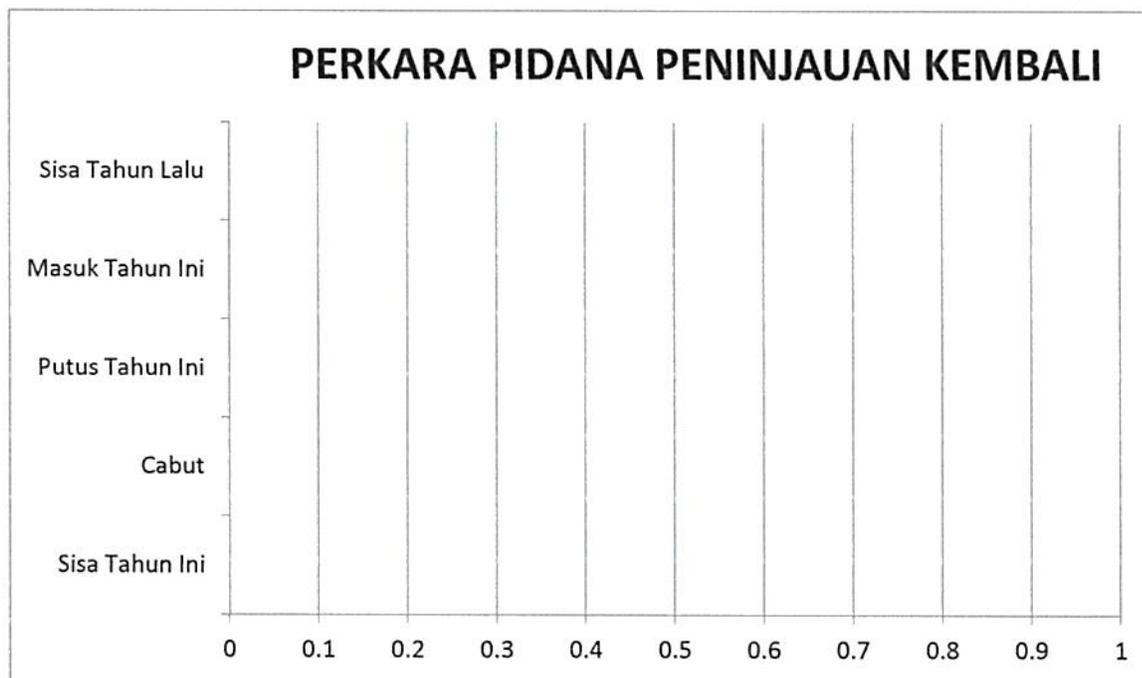


Ket. :
Sisa Tahun 2021 : 5 Perkara
Masuk Tahun 2022 : 6 Perkara
Putus Tahun 2022 : 3 Perkara
Cabut : 0 Perkara
Sisa Tahun 2022 : 8 Perkara

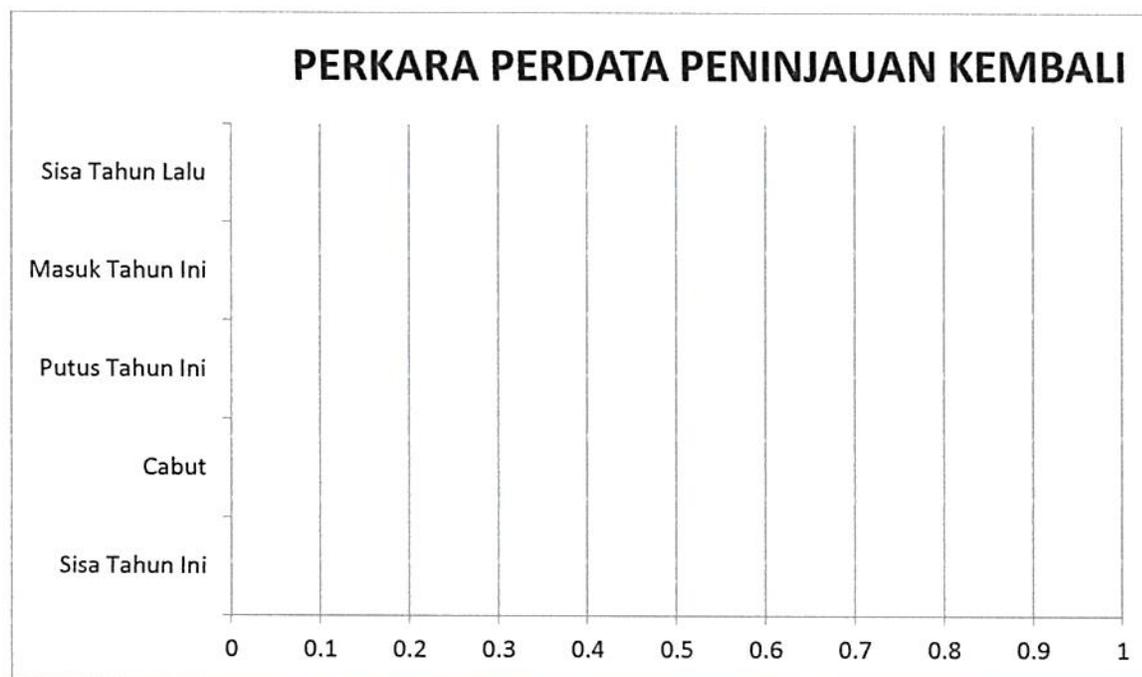


Ket. :
Sisa Tahun 2021 : 0 Perkara
Masuk Tahun 2022 : 0 Perkara
Putus Tahun 2022 : 0 Perkara
Cabut : 0 Perkara
Sisa Tahun 2022 : 0 Perkara

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali



Ket. :
 Sisa Tahun 2021 : 0 Perkara
 Masuk Tahun 2022 : 0 Perkara
 Putus Tahun 2022 : 0 Perkara
 Cabut : 0 Perkara
 Sisa Tahun 2022 : 0 Perkara



Ket. :
 Sisa Tahun 2021 : 0 Perkara
 Masuk Tahun 2022 : 0 Perkara
 Putus Tahun 2022 : 0 Perkara
 Cabut : 0 Perkara
 Sisa Tahun 2022 : 0 Perkara

B. PENYELESAIAN PERKARA

Penyelesaian perkara Perdata dan Pidana tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sebagai berikut :

Rekapitulasi Perkara

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Cabut/ Gugur	Sisa Perkara	*Ket
PERDATA							
1.	Permohonan	-	6	6	-	-	-
2.	Gugatan	10	25	29	1	5	-
PIDANA							
1.	Pidana Biasa	1	35	34	-	2	-
2.	Pidana Khusus	-	-	-	-	-	-
3.	Pidana Anak	-	3	3	-	-	-
4.	Pidana Lalu Lintas	-	285	285	-	-	-
5.	Pidana Ringan	-	-	-	-	-	-

1) Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara tahun 2021 yang diputus atau diselesaikan pada tahun 2022, sebagai berikut :

- a) Perdata : 10 (sepuluh) Perkara
- b) Pidana : 1 (satu) Perkara

2) Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

- a) Perdata : 29 (dua puluh sembilan) Perkara
- b) Pidana : 321 (tiga ratus dua puluh satu) Perkara

3) Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

- a) Perdata : 39 (tiga puluh sembilan) Perkara
- b) Pidana : 33 (tiga puluh tiga) Perkara

4) Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

Tidak ada perkara Perdata yang dinyatakan berhasil melalui upaya Mediasi.

5) Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Tidak ada perkara Pidana Anak yang dinyatakan berhasil melalui upaya Diversi pada tingkat Pengadilan Negeri.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (Sertifikasi ISO Pengadilan)

1. Posbakum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah layanan yang dibentuk oleh

dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan secara cuma-cuma layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan pendampingan hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan bagi masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penyelenggaraan Posbakum pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II yakni melakukan kerjasama dengan LBH SURYA NTT selama tahun 2022 telah berjalan dengan baik. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini terdapat dalam DIPA sejumlah Rp. 19.200.000,- (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Rupiah). Realisasi anggaran belanja hingga 31 Desember 2022 adalah Rp. 19.200.000,- atau mencapai 100%. Sisa anggaran untuk kegiatan Posbakum sebesar Rp. 0,-.

Posbakum Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah diseleksi sesuai dengan ketentuan yaitu berdasarkan tahapan-tahapan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum.

Posbakum di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah dilengkapi dengan sarana prasarana seperti meubelair dan kipas angin serta akan dilengkapi dengan komputer dan printer.

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Tidak ada kegiatan sidang keliling pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

3. Perkara Prodeo

Prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai oleh negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat tidak mampu secara ekonomis sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Dalam persidangan perkara pidana, bagi terdakwa yang diancam dengan pidana lebih dari 5 (lima) tahun, Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim juga telah menyediakan advokat/pengacara secara prodeo untuk mendampingi terdakwa di persidangan, bekerja sama dengan Posbakum yang telah ada di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

Pada DIPA Pengadilan Negeri Lembata Kelas II tidak dianggarkan belanja untuk kegiatan ini.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Kondisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

Dalam rangka mewujudkan kinerja peradilan yang berkualitas, Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah memiliki Sumber Daya Manusia yang terdiri atas tenaga Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial, yang berdasarkan keadaan per tanggal 31 Desember 2022 yakni sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Pangkat/ Golongan/Pendi- kan	*Keterangan
1	Perela De Esperanza, S.H.	Wakil Ketua	Pembina (IV/a) / S1	
2	Yulianto Thosuly, S.H.	Hakim	Penata Tk. I (III/d) / S1	
3	Tarekh Candra Darusman, SH.	Hakim	Penata Muda Tk. I (III/b) / S1	
4	Irza Winasis, S.H.	Hakim	Penata Muda Tk. I (III/b) / S1	
5	Petra Kusuma Aji, S.H.	Hakim	Penata Muda Tk. I (III/b) / S1	
6	Markus Reinardus Ariwibowo, S.H	Panitera	Penata Tk. I (III/d) / S1	
7	Jackson Deni Fahh, S.AP, S.H.	Sekretaris	Penata (III/c) / S1	
8	Semuel Ihgnasius Rili, S.H,	Panitera Muda Pidana	Penata Tk. I (III/d) / S1	
9	Hermanus Suban Huller, S.H.	Panitera Muda Perdata	Penata (III/c) / S1	
10	-	Panitera Muda Hukum	-	Kosong
11	Erniwati Penaten Ola, A.Md.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penata Muda (III/a) / D3	
12	Nani Kurnia Adriyani, S.H.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Penata (III/c) / S1	
13	Markus Balsasar Efata Nuban, S.H.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata (III/c) / S1	
14	Metty Susanty Susak, S.H.	Panitera Pengganti	Penata (III/c) / S1	PLT. Panmud Hukum
15	Ikna Diar Pratiwi, S.H	Panitera Pengganti	Penata (III/c) / S1	
16	Damianus Luda Ruma, S.H.	Jurusita	Penata (III/c) / S1	
17	Viktor J. Y. Kota Kally, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Muda (III/a) / S1	
18	Yakobus Lage	Jurusita Pengganti	Pengatur Tk. I (II/d) / SMA	
19	Septian Joko Tri Nugroho, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda (III/a) / S1	
20	I Made Adhi Yudisatria, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda (III/a) / S1	
21	I Wayan A. R. Nugraha, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda (III/a) / S1	
22	Doan Fardaril Nepa, A.Md.	Pengelola Perkara Peradilan	Pengatur (II/c) / D3	

Dari kondisi SDM yang ada saat ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan personil baik teknis dan non teknis yudisial pada Pengadilan Negeri

Lembata Kelas II pada akhir tahun 2022.

Selain itu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada bagian-bagian yang jabatan struktural teknis maupun non teknis belum terisi, maka ditempatkan staf/pegawai sebagai pelaksana. Bahkan ada bagian/urusan yang tidak memiliki staf/pegawai yaitu pada Kepaniteraan Hukum, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, oleh karena jumlah SDM yang tidak memadai.

Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Pengadilan Negeri Lembata Kelas II dari alur Tupoksi yang ada dibandingkan dengan SDM yang ada saat ini belum cukup memenuhi syarat dari sisi kuantitasnya bagi Pengadilan Negeri Kelas II, namun mampu melakukan pengelolaan organisasi yang terdesentralisasi ditentukan oleh beberapa hal antara lain : kejelasan proses kerja dan standar prosedur operasional (*SOP = Standard Operasional Procedure*) untuk setiap proses kerja, kejelasan tugas, tanggungjawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi serta kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggungjawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka langkah yang diambil sebagai pimpinan adalah dengan merekrut dan memberdayakan 12 (dua belas) orang Tenaga PPNPN yang diangkat dengan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, terdiri dari 8 (delapan) orang Pramubakti, 2 (dua) orang Supir dan 2 (dua) orang Satpam untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas administrasi, sehingga proses pelayanan dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat pencari keadilan dan pelaksanaan administrasi pada bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan dapat teratasi.

Terlepas dari tugas-tugas mereka sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, ke 12 (dua belas) orang Tenaga PPNPN tersebut adalah :

- a. **MARIA THERESIA KENEKA**, selain sebagai pramubakti diperbantukan sebagai tenaga administrasi dibagian Pidana;
- b. **RIKARDUS EMI LANGODAY**, selain sebagai pramubakti diperbantukan sebagai tenaga administrasi dibagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. **ALWAN BATA**, selain sebagai pramubakti diperbantukan sebagai tenaga administrasi dibagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- d. **PAULUS M. BURIN**, selain sebagai pramubakti diperbantukan sebagai tenaga administrasi dibagian Hukum;
- e. **GREGORIUS GUA**, selain sebagai pramubakti diperbantukan sebagai tenaga administrasi dibagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- f. **THERESIA BOLA**, selain sebagai pramubakti diperbantukan sebagai tenaga

- administrasi dibagian Umum dan Keuangan;
- h. **YA YANTI MARIA IKENG, S.Si**, selain sebagai pramubakti diperbantukan sebagai tenaga administrasi dibagian Perdata;
 - i. **ERIK FIRMANSYAH**, selain sebagai supir diperbantukan sebagai tenaga administrasi dibagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
 - j. **LAGADONI MARTINUS LEREK**, selain sebagai supir juga diperbantukan sebagai tenaga administrasi dibagian Umum dan Keuangan;
 - k. **ADRIANUS. KARANG**, selain sebagai satpam diperbantukan sebagai tenaga administrasi dibagian Umum dan Keuangan;
 - l. **ANTONIUS FAJARILIUS BAHU**, selain sebagai satpam diperbantukan sebagai tenaga administrasi dibagian Umum dan Keuangan.

1. Mutasi

Promosi dan mutasi bertujuan untuk melakukan pembinaan profesi dan karier bagi Hakim dan Pejabat Struktural PNS (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002) serta tenaga teknis peradilan, Pengaturan dan penempatan jenjang pangkat jabatan struktural (eselonisasi) maupun promosi dan mutasi Hakim dan pejabat struktural / pegawai dari satu pengadilan ke pengadilan lain yang lebih tinggi kelasnya, termasuk mutasi pangkat yang merupakan harapan utama yang diperoleh semua Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 jo Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002).

Dalam Tahun 2022 terjadi mutasi alih tugas bagi Hakim yakni atas nama Triadi Agus Purwanto, S.H. M.H. yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, menjadi Ketua pada Pengadilan Negeri Takalar Kelas II serta mutasi alih tugas bagi Panitera Pengadilan Negeri Lembata Kelas II atas nama Bernardino Goncalves, S.H. menjadi Panitera Pengadilan Negeri Larantuka.

Bahwa untuk diketahui Periode 01 April 2022 telah terjadi kenaikan pangkat sebanyak 6 (enam) orang Pegawai sedangkan untuk Periode 01 Oktober 2022 tidak ada pegawai yang diusulkan. Untuk kenaikan pangkat periode 01 April 2023 sebanyak 3 (tiga) Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II yaitu dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama / NIP	Pangkat Lama	Pangkat Baru	Keterangan
1	Irza Winasis, S.H.	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tk. I (III/b)	TMT : 01 April 2022
2	Tarekh Candra Darusman, SH.	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tk. I (III/b)	TMT : 01 April 2022
3	Metty Susanty Susak, S.H.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata (III/c)	TMT : 01 April 2022
4	Ikna Diar Pratiwi, S.H	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata (III/c)	TMT : 01 April 2022
5	Yakobus Lage	Pengatur	Pengatur Tk. I	TMT : 01 April 2022
6	Viktor J. Y. Kota Kally, S.H.	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tk. I (III/b)	TMT : 01 April 2023
7	Hermanus Suban Huller, S.H.	Penata (III/c)	Penata Tk. I (III/d)	TMT : 01 April 2023
8	Erniwati Penaten Ola, A.Md.	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tk. I (III/b)	TMT : 01 April 2023
9	Semuel Ihgnasius Rili, S.H,	Penata (III/c)	Penata Tk. I (III/d)	TMT : 01 April 2022

2. Promosi

Promosi merupakan hal wajar dalam rangka peningkatan karier namun hendaklah mempertimbangkan kondisi SDM yang ada dan segera ditindaklanjuti dengan mengisi kekosongan yang ada sehingga hal ini bisa menjadi jawaban terhadap permasalahan SDM di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II karena sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pada tahun 2022 terdapat beberapa orang pegawai di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II yang mendapat promosi pada jabatan struktural dan fungsional yaitu :

- a) **Perela De Esperanza, S.H.** yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II;

- b) **Markus Reinardus Ariwibowo, S.H.** yang sebelumnya menjabat sebagai Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II menjadi Panitera Pengadilan Negeri Lembata Kelas II;
- c) **Markus Balsasar Efata Nuban, S.H.** yang sebelumnya menjabat sebagai staf pada Pengadilan Negeri Soe Kelas II menjadi Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II;
- d) **Erniwati Penaten Ola, A.Md.** yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II menjadi Kasubbag Umum dan Keuangan pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II
- e) **Ikna Diar Pratiwi, S.H.** yang sebelumnya menjabat sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lembata Kelas II menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II;
- f) **Hermanus Suban Huler, S.H.** yang sebelumnya menjabat sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Lembata Kelas II menjadi Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II;
- g) **Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.,** yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, menjadi Ketua Pengadilan Negeri Takalar Kelas II;
- h) **Bernardino Goncalves, SH.** yang sebelumnya menjabat sebagai Panitera Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, menjadi Panitera pada Pengadilan Negeri Larantuka Kelas II;
- i) **Ana Maria S. Matutina, SH.** yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, menjadi Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Pengadilan Tinggi Kupang;

Berdasarkan struktur organisasi yang ada pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II masih terdapat jabatan-jabatan baik struktural dan fungsional yang belum terisi akibat kekurangan tenaga personil, yang dikarenakan baik dari segi kepangkatan maupun masa kerja belum memenuhi syarat untuk dipromosikan mengisi jabatan yang masih kosong. Pada jabatan struktural yakni **Panitera Muda Hukum**. Sedangkan untuk jabatan fungsional terdapat kekosongan pada jabatan **Fungsional Bendahara, Fungsional Pranata Komputer, Fungsional Pustakawan, Fungsional Arsiparis, Pranata Peradilan**.

3. Pensiun

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai, dan pada tahun 2022, tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang pensiun.

4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis)

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan langkah konkrit dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, bagian dalam bidang teknis maupun non-teknis. Selama tahun 2022 ada sejumlah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang diikuti oleh para Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, yaitu :

Jenis Diklat	Nama Peserta
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur dan SOP Perubahan	1. Pemateri : Jackson D. Faah, S.AP.,S.H. 2. Moderator : Hermanus S. Huler, S.H. 3. Notulis: Nani K. A. Adu, S.H. Peserta: Seluruh Aparatur Peradilan Pengadilan Negeri Lembata
Sosialisasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Pemateri : Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn. 2. Moderator : Daminus L. Ruma, S.H. 3. Notulis : Nani K. A. Adu, S.H. Peserta: Seluruh Aparatur Peradilan Pengadilan Negeri Lembata
Bimbingan Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI	KPN, Para Hakim, Para Panitera Muda dan Panitera Pengganti
Rekon Internal Data BMN dan Pengumpulan LBMN dan LK Semester II Tahun 2021	Jackson Deni Faah, S.AP., S.H., Ana M. S. Matutina,S.H., Erniwati Penaten Ola, A.Md., dan Septian Joko Tri Nugroho, S.H.
Lanjutan Rekon Internal Data BMN dan Pengumpulan LBMN dan LK Semester II Tahun 2021	Ana M. S. Matutina, S.H. dan Yakobus Lage
Bimbingan Teknis Aplikasi e- SADEWA	Jackson Deni Faah, S.AP, S.H. dan Ana M. S. Matutina, S.H.
Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Bencana Kerjasama dengan BPBD Kabupaten Lembata	Seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Lembata dan Pegawai BPBD Kab.Lembata
Sosialisasi Penilaian Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Menuju WBK dan WBBM secara online dan Sosialisasi Nilai-Nilai Dasar ASN (<i>Core Value</i>) ASN BerAkhlaq	KPN, Para Hakim,Panitera dan Sekretaris
Seminar Anti Korupsi Menuju Zona Integritas Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Nani Kurnia Adriyani Adu, S.H.
Sosialisasi Pemberlakuan dan Penggunaan Aplikasi PNBV Versi 2.0 pada SIMARI	Ana M. S. Matutina, S.H., Metty Susanti Susak, S.H. dan Ikna Diar Pratiwi, S.H.
<i>Short Course On Intellectual Property Rights</i>	Irza Winasis, S.H.
<i>Video Conference</i> Bimbingan Teknis <i>Marketplace dan Digital Payment</i>	Yakobus Lage
Sosialisasi PMK 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran dan Reformulasi IKPA TA 2022	Erniwati Penaten Ola, A.Md.
<i>Video Conference</i> Bimbingan Pengisian Output <i>pada aplikasi SAKTI TA 2022</i>	Jackson Deni Faah, S.AP., S.H.

FGD Pengumpulan Data dan Penyusunan naskah Akademik Kedudukan dan Status Jabatan Panitera dan Panitera Muda dalam Sistem Kepegawaian nasional Wilayah III (Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Bali, NTB, NTT dan Gorontalo)	Panitera dan Panitera Muda PN Lembata
Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Perkara Anak (SPPA) Bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Wilayah Indonesia Kelas A secara virtual	Yulianto Thosuly, S.H.
Pelatihan ECSCS <i>Preparation Test Batch 2 Kelas J secara online</i>	Septian Joko Tri Nigroho, S.H.
Sosialisasi Teknis Penginputan Aplikasi e-monev Bappenas TA 2022	Jackson Deni Faah, S.AP., S.H. dan Erniwati Penaten Ola, A.Md.
Rekonsiliasi Data Perbendaharaan Badan Urusan Administrasi BUA MARI	Jackson Deni Faah, S.AP., S.H. Ana M. S. Matutina, S.H., Nani Kurnia Adriyani adu, S.H dan Erniwati Penaten Ola, A.Md.
Pendampingan dalam update Aplikasi Persediaan Versi 21.1.0 dan SIMAK Versi 21.1.0	Ana M. S. Matutina, S.H. dan Yakobus Lage
Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gelombang VIII TA 2022	Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti PN Lembata
Pelatihan <i>End User Training</i> Aplikasi SAKTI Modul Pelaporan TA 2022	Ana M. S. Matutina, S.H., Septian J. T. Nugroho, S.H., dan Yakobus Lage
Bimbingan Teknis Tentang Perkara Perdata dan Pidana serta Administrasi Kepaniteraan dan Kejurusitaan	Bernardino Goncalves, S.H., Victor J. Y. Kotta Kally, S.H. dan Damianus Luda Ruma, S.H.
Sosialisasi Aplikasi e-Berpadu	Pemateri : Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., Moderator : Samuel I Rili, S.H. Notulis : Maria Theresia Keneka, SP. Peserta : Aparatur Peradilan PN Lembata
Bimbingan Teknis Kesekretariatan Tentang Penggunaan Aplikasi SAKTI untuk Modul Persediaan, Modul Asset Tetap dan Modul GLP Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Semester 1 TA 2022	Ana M. S. Matutina, S.H., Septian J. T. Nugroho, S.H., dan Yakobus Lage
Bimbingan Teknis Migrasi SAKTI di Kantor KPPN Larantuka	Ana M. S. Matutina, S.H., Septian J. T. Nugroho, S.H., dan Yakobus Lage
Sosialisasi SPPT-TI dan e-Berpadu oleh Tim Hukum dan Humas MA RI dan Pimpinan PT Kupang	Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., Bernardino Goncalves, S.H., Samuel Ihgansius Rili, S.H. dan I Wayan Adrian Rainartha Nugraha, S.H.
Blended Learning Latsar Gelombang I Golongan III Angkatan V Mahkamah Agung RI Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya TA 2022 Secara Online dan Offline	I Wayan Adrian Rainartha Nugraha, S.H.
Blended Learning Latsar Gelombang II Golongan II dan Golongan III Angkatan V Mahkamah Agung RI Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya TA 2022 secara Online dan Offline	I Made Adhi Yudisatria, S.H., dan Doan Fardaril Nepa, A.Md.
Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Triwulan III TA 2022	Jackson Deni Faah, S.AP., S.H., Erniwati Penaten Ola, A.Md., Yakobus Lage dan Septian Joko Tri Nugroho, S.H.
Rekonsiliasi Internal Antara Satuan Kerja Dan Koordinator Wilayah NTT	Erniwati Penaten Ola, A.Md., Yakobus Lage dan Septian Joko Tri Nugroho, S.H.

<p>Seri Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT) Bagi Peserta Latsar CPNS TA 2022</p> <p>1. Sosialisasi Etika Jabatan, Sosialisasi Standar Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja Jabatan, dan Sosialisasi Pengembangan Karir Jabatan (Pemateri Hakim Pratama Utama: Yulianto Thosuly, S.H.)</p> <p>2. Sosialisasi Peta Bisnis dan Uraian Jabatan, Sosialisasi Tupoksi Jabatan serta Sosialisasi Jabatan FUNgsional Tertentu (Pemateri Jackson Deni Faah, S.AP., S.H.)</p> <p>3. Sosialisasi Rencana Strategis Satuan Kerja (Pemateri Markus B. E. Nuban, S.H.)</p> <p>4. Sosialisasi Tata Persuratan dan Kearsipan Dinas (Pemateri Hermanus S. Huler, S.H.)</p> <p>5. Sosialisasi Penilaian Kinerja (Absensi) PKP dan SKP, serta Sosialisasi Layanan Kepegawaian (Rencana KGB, RKP dan Cuti) (Pemateri Nani K. A. Adu, S.H.)</p>	<p>I Made Adhi Yudisatria, S.H., I Wayan Adrian Rainartha Nugraha, S.H. dan Doan Fardaril Nepa, A.Md. (Peserta Latsar CPNS TA 2022)</p>
<p>Kegiatan Klasikal Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I Golongan III Angkatan V Latsar Mahkamah Agung RI Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya TA 2022</p>	<p>I Wayan Adrian Rainartha Nugraha, S.H.</p>
<p>Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Bagi Kaum Disabilitas Di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II</p>	<p>I Wayan Adrian Rainartha Nugraha, S.H. (Pemateri) Peserta : Seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Lembata</p>
<p>Sosialisasi Sahabat Kelompok Rentan (Sahabat Ketan) Di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II</p>	<p>I Made Adhi Yudisatria, S.H. (Pemateri) Peserta : Seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Lembata</p>
<p>Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pelayanan Ramah Anak Di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II</p>	<p>Doan Faradaril Nepa, A.Md. (Pemateri) Peserta : Seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Lembata</p>
<p>Kegiatan Klasikal Pelatihan Dasar CPNS Latsar Gelombang II Golongan II dan Golongan III Angkatan V Mahkamah Agung RI Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya TA 2022</p>	<p>I Made Adhi Yudisatria, S.H., dan Doan Fardaril Nepa, A.Md.</p>
<p>Pelatihan Singkat Identifikasi dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Bagi Ketua Pengadilan, Panitera, Panitera Muda dan Pengadministrasi Umum Pengadilan Negeri Seluruh Wilayah Indonesia</p>	<p>Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., Markus Reinardus Ariwibowo, S.H., Samuel Ihgansius Rili, S.H. Hermanus Suban Huler, S.H., Metty Susanty Susak, S.H. dan Septian J. T. Nugroho, S.H.</p>
<p>Bimbingan Teknis Kesekretariatan Tentang Displin dan Nilai-Nilai Dasar (Core Value) ASSN BerAkhlak, Penilaian Kinerja, Aplikasi Kepegawaian Oleh Pimpinan Tinggi Kupang</p>	<p>Perela De Esperranza, S.H., Jackson Deni Faah, S.AP. S.H. dan Nani Kurnia Adriyani Adu, S.H.</p>
<p>Rapat Koordinasi Bendahara Pengeluaran Batch Kedua</p>	<p>Erniwati Penaten Ola, A.Md.</p>

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

URAIAN	AKUN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi					
1066.994 Layanan Perkantoran					
5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					
Belanja Gaji Pokok PNS	5111111	960.004.000	906.403.700	53.600.300	
Belanja Pembulatan Gaji PNS	5111119	19.000	16.511	2.489	
Belanja Tunj. Suami/steri PNS	5111121	72.665.000	68.022.840	4.642.160	
Belanja Tunj. Anak PNS	5111122	16.293.000	15.640.586	652.414	
Belanja Tunj. Struktural PNS	5111123	28.190.000	28.140.000	50.000	
Belanja Tunj. Fungsional PNS	5111124	875.800.000	811.600.000	64.200.000	
Belanja Tunj. PPh PNS	5111125	99.155.000	84.670.715	14.484.285	
Belanja Tunj. Beras PNS	5111126	57.321.000	53.808.060	3.512.940	
Belanja Uang Makan PNS	5111129	212.112.000	198.728.000	13.384.000	
Belanja Tunjangan Umum PNS	5111151	8.735.000	7.900.000	835.000	
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	5111157	97.200.000	81.000.000	16.200.000	
Jumlah Belanja 5111		2.427.494.000	2.255.930.412	171.563.588	

Realisasi
31 Desember 2022

URAIAN	AKUN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
051.0A. PENANGANAN COVID-19					
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	522192	5,000,000	5,000,000	0	Realisasi 31 Desember 2022
Jumlah Belanja 051.0A		5,000,000	5,000,000	0	
002.0A. Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran					
Belanja Keperluan Perkantoran	521111	356,885,000	356,865,000	20,000	Realisasi 31 Desember 2022
Belanja Barang Operasional Lainnya	521119	39,782,000	39,782,000	0	
Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	521811	51,852,000	51,852,000	0	
Jumlah Belanja 002.0A		448.519.000	448.449.000	20.000	
002.0B. Langganan Daya Dan Jasa					
Belanja Keperluan Perkantoran	521811	186,000,000	182.773.677	3,226,323	
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	521114	13,500,000	13,500,000	0	
Belanja Langganan Listrik	522111	66,000,000	60,787,785	5,212,215	Realisasi 31 Desember 2022
Belanja Langganan Telepon	522112	9,900,000	1,720,500	8,179,500	
Belanja Langganan Air	522113	18,000,000	17,943,000	57,000	
Belanja Sewa	522141	3,000,000	3.000.000	0	
Jumlah Belanja 002.0B		296.400.000	279.724.962	16.675.038	
002.0C. Pemeliharaan Kantor					
Belanja Pemeliharaan Gedung dan			157,857,790	210	Realisasi 31 Desember 2022

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II

URAIAN	AKUN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Bangunan	523111	157.858.000			
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	523119	49.000.000	49.000,000	0	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	523121	134.365,000	134,356,100	8,900	
Jumlah Belanja 002.0C		341.223.000	341.213.890	9.110	
002.0D Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor					
Belanja Keperluan Perkantoran	521111	19,625,000	19,625,000	0	
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	521115	45,720,000	45,720,000	0	
Jumlah Belanja 002.0D		65.345.000	65.345.000	0	
002.0E. Rapat Koordinasi Internal					
Belanja Barang Operasional Lainnya	521119	1,800,000	1,799,800	200	Realisasi 31 Desember 2022
Jumlah 002.0E		1.800.000	1.799.800	200	
002.0F. Koordinasi Ke Tingkat Pusat/Tingkat Banding/Tingkat Pertama					
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	522192	100,000	0	100,000	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	524111	84,100,000	83,973,000	127,000	
Jumlah 002.0F		84.200.000	83.973.000	227.000	
002.0G. Konsultasi Ke KPPN/KANWIL DJPb/KPKNL					
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	522192	100,000	0	100,000	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	524111	62,420,000	61,732,882	687,118	Realisasi 31 Desember 2022

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II

URAIAN	AKUN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
002.0H. Penanganan COVID-19					
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	521131	5,000,000	4,980,800	19,200	Realisasi 31 Desember 2022
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	522192	5,000,000	5,000,000	0	
Jumlah 002.0H		10,000,000	9,980,000	19,200	
002. 0I. Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim					
Belanja Sewa	522141	11,880,000	11,880,000	0	Realisasi 31 Desember 2022
Jumlah 002.0H		11,880,000	11,880,000	0	

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

URAIAN	AKUN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung					
1071.951 Layanan Internal (Overhead)					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	532111	32,000,000	32,000,000	0	Realisasi 31 Desember 2022
Jumlah Belanja 5321		32,000,000	32,000,000	0	
TOTAL PROGRAM 03.04.02		32,000,000	32,000,000	0	
TOTAL BELANJA SATKER		3,786,381,001	3,597,079,746	189,301,254	95,00 %

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

URAIAN	AKUN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum					
1049.003 Pos Bantuan Hukum					
Belanja Jasa Konsultansi	522131	19.200.000	19.200.000	0	Realisasi 31 Desember 2022
Jumlah Belanja 5221		19.200.000	19.200.000	0	
1049.005 Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding Yang Tepat Waktu					
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	521114	520.000	166.800	353.200	Realisasi 31 Desember 2022
Jumlah Belanja 5211		520.000	166.800	353.200	
Belanja Bahan	521211	11.155.000	10.758.500	396.500	
Jumlah Belanja 5212		11.155.000	10.758.500	396.500	
Belanja Barang Persediaan Konsumsi	521811	3.585.000	3.585.000	0	Realisasi 31 Desember 2022
Jumlah Belanja 5218		3.585.000	3.585.000	0	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	524113	7.625.000	7.220.000	405.000	
Jumlah Belanja 5241		7.625.000	7.220.000	405.000	
Total Program 03.04.07		42.085.000	40.930.300	1.154.700	
TOTAL BELANJA SATKER		42.085.000	40.930.300	1.154.700	97,26

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a) Pengadaan :

- Gedung Kantor :

Terletak di jalan Trans Atadei, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan luas bangunan 1.586 m² yang dibangun dengan sumber dana APBN yang dialokasikan dalam DIPA Pengadilan Negeri Larantuka pada tahun 2006 dan dalam Tahun Anggaran 2007 dengan DIPA Pengadilan Negeri Lembata Kelas II. Selain itu juga telah dibangun gedung arsip dan perpustakaan dengan luas bangunan 63 m² bertujuan untuk disediakan ruang khusus guna pengelolaan dan penataan arsip-arsip berkas perkara dari tahun ketahun serta pengelolaan dan penataan buku-buku perpustakaan, kemudian dalam Tahun Anggaran 2009 dengan DIPA Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah dibangun garasi barang bukti dan garasi kantor. Garasi barang bukti untuk penyimpanan barang-barang bukti dalam kecelakaan lalulintas, dalam Tahun Anggaran 2010 untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan kantor.

Pada tahun 2019 telah dibuat ruang *kaukus*, meja *Inzage* dan tempat sampah kantor, tempat parkir motor untuk pengunjung yang hingga tahun 2022 ini dalam kondisi baik.

Pada tahun 2020 telah dibuat jalur dan tangga darurat evakuasi di halaman belakang kantor, pengecatan fasilitas-fasilitas luar dan dalam kantor, penataan taman taman kantor, pembuatan pagar pembatas tanah kapling sebelah barat kantor, pembuatan area steril pembatas area kerja dengan area pelayanan dan pembuatan ruang rapat dan telekonferensi di lantai dua kantor.

- Rumah Dinas/Rumah Negara :

Rumah Dinas/Rumah Negara merupakan fasilitas yang disediakan untuk untuk Ketua, Wakil Ketua dan para Hakim Pengadilan Negeri Lembata Kelas II untuk memberikan kenyamanan serta konsentrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Dalam Tahun Anggaran 2006 dengan sumber dana DIPA Pengadilan Negeri Larantuka telah dibangun 7 (tujuh) unit Rumah Dinas Hakim dengan luas bangunan masing-masing 54 m² yang terletak di dalam kompleks kantor tepatnya dibelakang gedung Kantor Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, namun pada saat pembangunan tidak dianggarkan biaya pengadaan dan pemasangan meteran rumah dinas

sehingga untuk penerangan rumah dinas tersebut menggunakan listrik kantor yang pembayarannya dilakukan oleh Kantor sampai dengan bulan Juni 2011. Untuk saat ini Rumah Dinas/Rumah Negara sudah memiliki meteran listrik tersendiri yang biayanya dibebankan kepada penghuninya. Sedangkan khusus untuk rumah dinas Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris belum ada. Untuk 7 (tujuh) unit Rumah Dinas Hakim tersebut saat ini sementara ditempati oleh :

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Ketua	1	√			Rehab
2.	Wakil Ketua	1		√		Rehab
3.	Hakim	3		√		Rehab
4.	Panitera	1		√		Rehab
5.	Sekretaris	1		√		Rehab

Usulan untuk pembangunan Rumah Dinas/Rumah Negara untuk Ketua dan Wakil diatas lahan yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata belum diakomodir karena memberikan prioritas kepada Pengadilan Negeri yang baru dibentuk berupa pengadaan sarana dan prasarana gedung maupun sarana dan prasarana fasilitas gedung.

- Kendaraan Dinas

Sejak tahun 2006 hingga tahun 2022 Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah memiliki sejumlah kendaraan dinas yang terdaftar dalam daftar SIMAK BMN guna membantu untuk kelancaran proses pelayanan operasional perkantoran, yakni :

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
KENDARAAN RODA 4						
1	Toyota Inova	2006		√		
2	Toyota Avanza	2015	√			
KENDARAAN RODA 2						
1	Honda NF 100 SL	2007	√			
2	Honda NF 100 SL	2007	√			
3	Honda Supra Fit X	2008		√		
4	Honda NNF11C1C	2011	√			
5	Honda NNF11C1C	2011	√			

b) Pemeliharaan :

Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor maupun Rumah Dinas/Rumah Negara dialokasikan dalam DIPA Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, dan dengan kondisi bangunan kantor yang telah direhab antara lain Pagar depan Kantor, Tampak depan Kantor yang sesuai dengan prototipe, Ruang Ketua, Ruang Wakil Ketua, Ruang Hakim, Ruang Pidana, dan area steril, pagar pembatas dan perbaikan Perpustakaan dan pada tahun 2022 telah dilakukan perawatan sarana dan prasarana gedung kantor antara lain pengecatan ruang sidang anak, ruang arsip, perpustakaan dan pemeliharaan rutin lainnya.

Untuk Rumah Dinas telah diadakan kegiatan renovasi untuk 7 (tujuh) rumah dinas Hakim dan untuk kendaraan dinas telah dilakukan perawatan secara rutin sesuai dengan yang telah dianggarkan dalam DIPA.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

(a) Pengadaan :

- ✓ Dalam Tahun Anggaran 2022 tidak dialokasikan dana dalam DIPA Pengadilan Negeri Lembata Kelas II untuk pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung.
- ✓ Terdapat penambahan alat pengolah data dan komunikasi perolehan dari DIPA Mahkamah Agung RI Tahun 2019 berupa 2 (dua) unit Printer, dan penambahan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa 4 (empat) unit AC, penambahan kelengkapan sarana dan prasarana siding online berupa 5 (lima) unit PC, 1 (satu) unit kamera, 1 (satu) unit tv monitor, 1 (satu) unit equalizer, 7 (tujuh) buah mic, 4 (empat) unit laptop dan 4 (empat) unit speaker aktif.
- ✓ Secara keseluruhan sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Lembata Kelas II hingga tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Sarana / Prasarana	Jumlah	Keterangan
I. RUANGAN			
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Kepaniteraan	3	
7	Ruang Sekretariat	3	
8	Ruang Sidang Umum	2	Utama dan I
9	Ruang Sidang Anak	1	
10	Ruang Server	1	

11	Ruang PTSP	1	
12	Ruang Mediasi/Diversi	1	
13	Ruang Posbakum/PenasehatHukum	1	
14	Ruang Jaksa	1	
15	Ruang Tahanan	1	Sel Pria dan Wanita yang masing-masing terpisah
16	Ruang Tunggu Anak	1	
17	Ruang Barang Bukti	1	
18	Ruang Arsip Perdata	1	
19	Ruang Arsip Pidana	1	
20	Ruang Tamu Terbuka	1	
21	Ruang Ramah Anak	1	
22	Ruang Klinik dan Laktasi	1	
23	Ruang Perpustakaan	1	
24	Ruang <i>Kaukus</i>	1	
25	Ruang Bapas	1	
26	Ruang Pantry	1	
27	Ruang Gudang	1	
II. Gedung/Bangunan			
1	Tempat Parkir/Garasi	1	
2	Pos Sekuriti / Satpam	1	
III. Fasilitas Perkantoran			
1	Server	2	
2	Rak server	1	
3	Router	1	
4	Wireless PCI Card	10	
5	Modem	-	
6	Wireless	1	
7	AC	24	
8	Komputer / PC	28	
9	Laptop	14	
10	Printer	17	
11	Scanner	2	
12	Mesin fotocopy	2	1 unit Rusak Berat
13	PBAX	1	
14	Stasionary Generating Set	2	1 unit rusak berat
15	Pompa Air	1	
16	Lemari Besi	-	
17	Lemari Kayu	69	
18	Lemari Katalog	1	
19	Rak Besi	3	
20	Rak Kayu	1	
21	Brandkas	2	
22	Meja Kerja Besi/Metal	1	
23	Meja Kerja Kayu	76	
24	Meja Komputer	6	
25	Meja Ketik	4	
26	Meja Resepsionis	1	
27	Meja Makan Besi	1	
28	Meja Makan Kayu	1	
29	Kursi Besi/Metal	64	
30	Kursi Kayu	37	
31	Kursi Fiber Glass/Plastik	14	
32	Bangku Panjang Besi/Metal	18	
33	Bangku Panjang Kayu	21	
34	Tempat Tidur Kayu	3	
35	Kasur/Sping Bed	1	
36	Dispenser	5	
37	Partisi	3	

38	Mesin Pemotong Rumput	1	Rusak Berat
39	Kipas Angin	9	
40	Televisi	2	
41	Amplifier	1	
42	Loudspeaker	8	
43	Microphone Table Stand	3	
44	Stabilisator	2	
45	Tiang Bendera	7	
46	LCD Monitor	2	
47	Lambang Instansi	1	
48	Microphone/Wireless Mic	1	
49	Microphone/Boom Stand	1	
50	Microphone Cable	8	
51	Power Amplifier	1	
52	Digital Audio Storage System	1	
53	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	
54	Antene SHF Stationary	-	
55	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	1	
56	Switcher Antena Lainnya	1	
57	Reciever STL/UHF	2	
58	Fax	1	
59	Papan Visual/Papan Nama	11	
60	CCTV	1	
61	Mesin Finger Scan	1	
62	Jaringan listrik lainnya	8	
63	Monografi	9	
64	TV Monitor	1	
65	Kamera Sidang	1	

(b) Pemeliharaan :

Untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana fasilitas gedung yang ada, maka setiap tahun telah dialokasikan dana dalam DIPA khusus untuk biaya pemeliharaan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas bantuan, juga untuk percepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

(c) Penghapusan :

Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, masih mendata pengusulan untuk penghapusan peralatan dan mesin yang telah rusak.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dewasa ini, dinamika pasca reformasi, kian mendorong Pemerintah agar lebih meningkatkan transparansinya (keterbukaan) dalam setiap aktivitas pelayanan publik kepada seluruh masyarakatnya. Tuntutan ini juga kian mengkrystal dalam bentuk “jaminan” atas akses informasi publik.

Pada dasarnya informasi selalu dan mampu memberikan kontribusi penting bagi pengembangan sosial dan demokrasi. Jika masyarakat kita telah lebih baik dalam mengelola informasi, memberi dan mengambil manfaat dari

sumber-sumber informasi terutama dalam hal-hal terpenting dari pemerintahan, layanan dan akses publik, maka besar kemungkinan mereka bisa memberikan kontribusi yang tidak kalah penting dengan ikut berperan serta dalam “mempengaruhi” lahirnya sebuah (produk) keputusan atau mungkin juga undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan telah diganti dengan Surat Keputusan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011, maka Pengadilan berkewajiban untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sebagaimana bunyi Pasal 2 Bagian Pertama dalam keputusan ini, bahwa Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan upaya strategis untuk mengembangkan informasi Pengadilan tentang pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dan diharapkan makin mendekatkan Pengadilan dengan rakyat pencari keadilan.

Mahkamah Agung RI telah mendesain sistem atau pola penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan keragaman karakteristik daerah didukung dengan perkembangan teknologi komunikasi yang ada sehingga diharapkan semua Pengadilan sudah memiliki front office di dunia maya, baik yang dikemas dalam bentuk portal maupun website/situs. Akses langsung inilah yang sedianya diharapkan sebagai “*better informed*” atas layanan informasi dan publisitas melalui networking area (internet). Namun demikian, layanan informasi yang demikian itu akan lebih baik jika data-data yang disajikan selalu diperbaharui. Demi mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelayanan informasi pengadilan yang transparan, di lingkungan Pengadilan, perlu dilakukan pendayagunaan organisasi meliputi penataan struktur, fungsi, rentang kendali dan saling hubungan dalam proses pengambilan keputusan, penetapan kebijaksanaan alokasi dan realokasi sumber daya serta efisiensi birokrasi. Dengan demikian diharapkan akan mampu meningkatkan performance (kinerja) pelayanan publik yang optimal.

Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut Program Keterbukaan Informasi Pengadilan yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sejak tahun 2012 telah melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan pelayan informasi publik, salah satu kegiatan tersebut adalah meningkatkan sarana dan prasarana IT berupa pengadaan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) dan upaya memberikan layanan informasi dan publisitas melalui networking area

(internet) yang dikemas dalam bentuk portal maupun website/situs yaitu:

✓ **Perangkat Keras :**

- (a) 1 (satu) unit Server Fujitsu Primergy TX1330 M4 PS170 S2631K1639-V601 serial no. MAJL006527;
- (b) 1 (satu) unit Monitor Merek LG 42”;
- (c) 1 (satu) unit LAN Network;
- (d) 1 (satu) unit Wireless;
- (e) 7 (tujuh) unit UPS;
- (f) 2 (dua) unit Server;
- (g) 1 (satu) unit Mikrotik Router Board

✓ **Perangkat Lunak :**

- (a) Website dengan domain name <http://pn-lembata.go.id>;
- (b) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/CTS dengan Domain Name : <http://sipp.pn-lembata.go.id>;
- (c) Software bahasa program;
- (d) Software program paket;
- (e) Antivirus.

1. Implementasi *e-Court*

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi saat ini, Mahkamah Agung menghadirkan sejumlah inovasi layanan berbasis internet, yang diharapkan dapat mempermudah pemberian layanan kepada para pencari keadilan, salah satunya yakni aplikasi *E-Court*. Aplikasi ini menjadikan sistem pendaftaran perkara pada Pengadilan dapat dilakukan secara online. Dasar hukum penerapan e-court pada badan peradilan antara lain :

- ✓ Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
- ✓ Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 122/ KMA/ SK/ VII/ 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan;
- ✓ Keputusan Dirjen Badilum Nomor 271/ DJU/SK/PS01/ 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sendiri telah menerapkan *e-court* dan hingga akhir tahun 2022 seluruh perkara yang terdaftar yaitu sebanyak 13 perkara gugatan biasa dan 2 Gugatan sederhana seluruhnya telah

menerapkan aplikasi e-Court dan sejumlah 45% dari total perkara perdata telah menerapkan e-Litigasi, dimana yang tidak menerapkan e-Litigasi disebabkan karena pihak Tergugat tidak menggunakan jasa Penasihat Hukum dan Koneksi Internet di desa-desa di Lembata belum memadai.

2. Implementasi SIPP

Pada tahun 2012 informasi terkait perkara pada peradilan semakin mudah didapatkan dengan adanya *Case Tracking System (CTS)* atau yang saat ini dikenal dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Tujuan utama hadirnya SIPP adalah terciptanya tertib administrasi perkara dan terciptanya pengelolaan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan saling menunjang bagi internal aparat peradilan serta pihak lain yang membutuhkan informasi perkara.

Pengadilan Negeri Lembata Kelas II terus memantau terkait pembaharuan versi aplikasi SIPP, dimana saat ini telah mencapai versi terbaru yaitu versi 5.1.0.

Berdasarkan hasil pemantauan melalui aplikasi MIS dan kegiatan Monev terkait kinerja SIPP dan MIS Pengadilan Negeri Lembata Kelas II yang dilakukan setiap bulan baik saat Pengawasan Internal maupun Pengawasan Eksternal, menunjukkan data elektronik pada aplikasi SIPP dan berkas perkara telah sesuai serta terisi dengan baik.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri sebagai rumah bagi masyarakat pencari keadilan harus dapat menjadi lembaga yang memiliki kredibilitas dan dipercaya oleh publik, oleh karenanya selain memberikan pelayanan sebagaimana tupoksinya, Pengadilan Negeri Lembata Kelas II dituntut harus dapat memberikan pelayanan yang baik dan terukur, menciptakan wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi yang bersih dan melayani.

Untuk mencapai hal tersebut, Dirjen Badilum telah membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan Nomor 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001:2008, diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, sebagai upaya untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent-ICPE).

Berdasarkan penilaian dari Tim Penjaminan Dirjen Badilum pada tanggal 22-24 Mei 2017, kita patut bersyukur karena Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Pengadilan dengan nilai "A" excellent, yang diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 27 Juli 2017 di Banyuwangi.

Bahwa berdasarkan penilaian terakhir dari tim KEKA Badilum tanggal 04 April 2022, Pengadilan Negeri Lembata dapat mempertahankan nilai akreditasi dengan jumlah 711 sehingga tetap mempertahankan nilai "A" Excellent.

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu, dimana PTSP di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah dibuat sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/II/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

PTSP bertujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

PTSP dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya yang dilaksanakan yaitu pelayanan e-Court dengan menggunakan meja pojok *e-court*, dan meja *Inzage*.

Meja PTSP Pengadilan Negeri Lembata di tahun 2022 juga dilengkapi dengan mesin Kiosk Informasi, CCTV, televisi pengunjung, mesin antrian PTSP untuk masyarakat pengguna layanan PTSP serta perangkat lainnya.

Petugas PTSP juga senantiasa telah dilakukan briefing oleh petugas briefing secara rutin dan telah diadakan pelatihan oleh Customer Service BRI cabang Lewoleba.

PTSP di masa Corona Virus Disease 19 ini juga telah ditingkatkan sedemikian rupa sehingga tetap mengedepankan protokol kesehatan dengan fasilitas-fasilitas seperti, Mika pembatas, thermometer tembak, petunjuk-petunjuk protokol kesehatan, hand sanitizer dan cairan sterilisasi desinfectan.

PTSP pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah dibuat sesuai pedoman standar tersebut lengkap dengan susunan petugas yang dibuat sesuai SK Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, memiliki SOP terkait pelayanan meja PTSP, penyediaan brosur-brosur, dan Job Description masing-masing petugas di meja PTSP.

3. Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi pelayanan publik merupakan pemberdayaan, pembelajaran, dan pengembangan untuk menyebarluaskan ide kreatif, gagasan, dan terobosan pelayanan publik di Indonesia guna percepatan peningkatan

kualitas pelayanan publik.

Beberapa inovasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II adalah :

- a. Penyampaian brosur-brosur elektronik secara langsung ke desa-desa terkait pelayanan Eraterang;
- b. Kiosk Touchscreen atau anjungan touchscreen yang diletakkan di area PTSP yang berisi menu informasi berupa hasil Survey Kepuasan Pelayanan Masyarakat, hasil survey Indeks Persepsi Korupsi, aplikasi SIWAS MARI, SIPP dan Website tentang peradilan yang dapat diakses secara elektronik oleh masyarakat, serta brosur brosur elektronik yang dapat di akses di mesin Kiosk tersebut sehingga mempermudah masyarakat memperoleh informasi secara mandiri apabila datang ke kantor Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.
- c. Perangkat SMS Gateway, diluncurkan awal tahun 2020, dan brosur-brosur SMS Gateway telah disebarluaskan yang merupakan aplikasi berbasis SMS yang berfungsi memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkara perkara yang ada di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II baik dari segi jenis maupun proses sehingga dapat memberikan info keadaan perkara secara sederhana.
- d. Aplikasi SIBAPER, diluncurkan bulan Mei 2020 yaitu Sistem Informasi Barang dan Persediaan adalah aplikasi mandiri untuk distribusi barang, persuratan, arsip di lingkungan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sehingga permintaan barang dan dokumen-dokumen dapat diinput melalui aplikasi tersebut sehingga mempermudah pengguna dalam menginput permintan barang dan mencari dokumen-dokumen dan SK-SK dan sekaligus penghematan penggunaan kertas menuju masa *paperless*.
- e. Aplikasi E-Survey, diluncurkan bulan November 2020 yang memuat survey kepuasan masyarakat dan sekaligus survey indeks persepsi korupsi secara elektronik yang bisa diisi oleh pengguna pengadilan yang menggantikan survey yang menggunakan kertas biasa sehingga mempermudah pengisian dan pendataan serta pembuatan laporan hasil survey bagi tim survey PN Lembata yang mana dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Dalam melakukan pengawasan internal langsung ditangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sebagai Koordinator Pengawas Bidang dan Para Hakim sebagai Hakim Pengawas Bidang dikarenakan hingga awal November 2022 baru ada Wakil Ketua namun dalam hasil TPM tersebut juga Ketua pindah tugas sehingga dari awal november 2022 hingga saat ini hanya terdapat Wakil Ketua saja.

Bahwa untuk mengoptimalkan pengawasan melekat yang ada pada masing-masing pejabat yang bersangkutan, telah dilakukan tatap muka secara berkala dengan semua Hakim dan Pegawai serta tenaga honorer untuk mengakomodir segala permasalahan yang timbul serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Oleh karenanya pengawasan juga dilihat dalam konteks pembinaan dan peningkatan kapasitas kinerja. Di samping itu juga untuk meningkatkan penggunaan parameter obyektif dengan berpedoman pada Standard Operational Procedure (SOP) buku IV tentang Tata Laksana pengawasan Pengadilan.

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi dan finansial dengan sasaran pengawasan kepada aparat Pengadilan Negeri Lembata Kelas II dalam bentuk pengawasan langsung dengan cara pemeriksaan reguler dan pemeriksaan serta pengawasan tidak langsung dengan cara melakukan penilaian atas laporan tertulis, laporan lisan dan pemberitaan lewat media massa (apabila ada). Pengawasan bulanan oleh Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap bulan serta Audit Internal dan Eksternal dari Pengadilan Tinggi Kupang yang dilaksanakan secara berkala yakni 2 (dua) kali setahun sebagai bagian dari penjaminan mutu.

Pelaksanaan pengawasan dilingkungan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II meliputi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilingkungan Kepaniteraan yang mencakup administrasi persidangan dan administrasi perkara, pelaksanaan tugas pokok dilingkungan Kesekretariatan yang meliputi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, inventaris barang dan administrasi umum, pengawasan terhadap perilaku aparat pengadilan, dan evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan kinerja pengadilan dan kualitas pelayanan publik serta

pengawasan terhadap 5R dan K3 untuk memaksimalkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

Bahwa di tahun 2022 selain pengawasan Internal telah pula dilaksanakan oleh Pengawas Eksternal yaitu :

1. Tim Assessment dari Pengadilan Tinggi Kupang yang telah mengadakan pembinaan, assessment, serta pengawasan pada bulan April 2022 yang mana hasil temuan telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.
2. Pembinaan dan pengawasan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang pada bulan September 2022 di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

B. EVALUASI

Hasil assessment dan pengawasan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis oleh untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, dan akan dievaluasi dalam rapat bulanan untuk menindaklanjuti temuan-temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing Hakim Pengawas bidang dengan melakukan penyesuaian/perbaikan dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi benar-benar sesuai dengan *Standard Operational Procedure (SOP)*.

Bahwa selain pengawasan reguler dari Hakim Pengawas tersebut setiap bulan telah dilakukan laporan monitoring dan evaluasi atas segala kegiatan yang termasuk dalam kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Akreditasi Penjaminan Mutu dan telah dikeluarkan Surat keputusan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II terkait pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan checklist hal-hal yang harus dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya dan dibahas dalam rapat evaluasi bulanan.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Tugas-tugas Bantuan baik di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam proses penyelenggaraan administrasi, maka langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil adalah dengan mengevaluasi hasil pengawasan yang dilakukan baik oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung RI maupun oleh Pengadilan Tinggi Kupang serta Hakim Pengawas Bidang, untuk selanjutnya meningkatkan fungsi pengawasan internal terhadap semua bagian/urusan dalam rangka pembinaan terhadap jajaran Pengadilan Negeri Lembata Kelas II untuk mencapai suatu keberhasilan, sehingga secara perlahan akan membuat organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran yang menjadi salah satu tujuan reformasi birokrasi.

B. SARAN

Dari struktur organisasi yang ada jelas terdapat kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sehingga perlu mendapat perhatian yang serius dengan mengisi jabatan-jabatan struktural dan fungsional dan ditindaklanjuti melalui promosi dan mutasi guna mendukung proses penyelenggaraan administrasi di bidang kepaniteraan dan kesekretariatan sehingga dengan demikian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan sesuai dengan *Standard Operasional Procedure (SOP)* sebagai petunjuk dasar dalam menyelesaikan tugas Yustisia maupun administrasi.

Demikian laporan tahunan ini kami buat sesuai dengan kondisi yang ada saat ini untuk diketahui serta menjadi pertimbangan dan atas perhatian, diucapkan terima kasih.

Lewoleba, 17 Januari 2023
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA

PERELA DE ESPERANZA, S.H.
NIP. 19801130 200312 1 001